PENGADILAN TINGGI BANTEN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jl. Raya Pandeglang KM 6,6

Serang - Banten 421161

Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001

e-mail : ptbanten_judge@yahoo.co.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Pandeglang KM 6,6

Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001

Serang - Banten 421161

e-mail : ptbanten_judge@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Banten. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, Agustus 2018
Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H
NIP. 19691130 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI.	Lampiran Rincian Akumulasi Penyusutan	57

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jl. Raya Pandeglang KM. 6.6 Serang 42126
Telp. 0254 251385,250002, Fax 0254 250001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Semester 1 Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Agustus 2018
Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H
NIP 19691130 199203 1 00 1

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten Semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.685.210 atau mencapai 38,81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp53.300.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp11.178.444.928 atau mencapai 53,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.798.829.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir 30 Juni 2018. Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.094.253.510 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp105.549.350; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp11.940.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.975.714.160; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.050.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp75.000.000 dan 32.019.253.510.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp17.126.010, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.232.925.570 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.215.799.560. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp45.150 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.215.844.710.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp32.077.338.502 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp11.215.844.710 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.157.759.718 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp32.019.253.510.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	53,300,000	20,685,210	38.81	34,464,165
JUMLAH PENDAPATAN		**53,300,000**	**20,685,210**	**2.58**	**34,464,165**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	17,814,168,000	10,047,918,255	56.40	8,225,726,673
Belanja Barang	B.4	2,299,661,000	959,360,473	41.72	782,160,038
Belanja Modal	B.5	685,000,000	171,166,200	24.99	488,879,000
JUMLAH BELANJA		**20,798,829,000**	**11,178,444,928**	**53.75**	**9,496,765,711**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI BANTEN
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	75,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	12,000,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(60,000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	35,562,150	35,443,375
Persediaan Belum Diregister	C.11	(5,012,800)	-
Jumlah Aset Lancar		105,549,350	47,383,375
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	12,000,000	6,000,000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(60,000)	(30,000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		11,940,000	5,970,000
ASET TETAP			
Tanah	C.14	22,301,011,000	22,301,011,000
Peralatan dan Mesin	C.15	4,942,668,846	5,011,157,746
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	9,062,621,000	9,037,175,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	387,747,000	387,747,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	6,355,062	6,355,062
Konstruksi dalam pengerjaan	C.21	6,291,500	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(4,730,980,248)	(4,680,149,029)
Jumlah Aset Tetap		31,975,714,160	32,063,296,779
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	357,917,600	150,000,000
Aset Lain-Lain Yang Belum Diregister	C.25	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(356,867,600)	(150,000,000)
Jumlah Aset Lainnya		1,050,000	-
JUMLAH ASET		**32,094,253,510**	**32,116,650,154**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	75,000,000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	36,870,852
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	2,440,800
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75,000,000	39,311,652
JUMLAH KEWAJIBAN		75,000,000	39,311,652
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	32,019,253,510	32,077,338,502
JUMLAH EKUITAS		32,019,253,510	32,077,338,502
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**32,094,253,510**	**32,116,650,154**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17,126,010	28,464,045
JUMLAH PENDAPATAN		**17,126,010**	**28,464,045**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10,024,344,118	8,228,402,623
Beban Persediaan	D.3	40,999,435	60,110,905
Beban Barang dan Jasa	D.4	355,534,882	310,132,032
Beban Pemeliharaan	D.5	307,327,716	138,193,136
Beban Perjalanan Dinas	D.6	247,050,600	206,111,800
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	257,698,819	209,615,344
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(30,000)	(30,000)
JUMLAH BEBAN		**11,232,925,570**	9,152,535,840
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(11,215,799,560)**	**(9,124,071,795)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	(639,600)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		191,530	201,285
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		146,380	51,785
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(45,150)	(789,100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(11,215,844,710)**	**(9,124,860,895)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(11,215,844,710)**	**(9,124,860,895)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	32,077,338,502	11,421,776,638
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11,215,844,710)	(20,402,842,846)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	20,394,327,136
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	20,406,014,581
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	(11,687,445)
JUMLAH		**(11,215,844,710)**	(8,515,710)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	11,157,759,718	20,664,077,574
EKUITAS AKHIR	E.5	**32,019,253,510**	**32,077,338,502**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintahan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2008;
e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaannomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
l. Peraturan Menteri Keuangan nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Banten

Profil dan Kebijakan Teknis

Tahun 2017 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Banten adalah Visi Pengadilan Tinggi Banten adalah TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG yang bertujuan agar Pengadilan Tinggi Banten menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Banten adalah Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan di Pengadilan Tinggi Banten;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Banten melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Banten. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang,

rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Banten belum melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	53,300,000	53,300,000
Jumlah Pendapatan	**53,300,000**	**53,300,000**
Belanja		
Belanja Pegawai	17,814,168,000	17,814,168,000
Belanja Barang	2,299,661,000	2,299,661,000
Belanja Modal	685,000,000	685,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**20,798,829,000**	**20,798,829,000**

Realisasi Pendapatan Rp20.685.210

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp20.685.210 atau mencapai 38,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp53.300.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Banten terdiri dari Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-lain	53,300,000	20,685,210	38.81%
Jumlah	**53,300,000**	**20,685,210**	38.81

Tidak ada Realisasi Pendapatan Jasa semester pada 1 TA 2018. Selain itu, Pendapatan Lain-lain pengadilan Tinggi Banten mengalami penurunan sebesar 39,98 persen sebab pada semester 1 tahun anggaran 2017 terdapat pendapatan yang berasal dari sewa kantin.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Lain-lain	20,685,210	34,464,165	-39.98
Jumlah	**20,685,210**	**34,464,165**	**-39.98**

Realisasi Belanja Negara Rp11.178.444.928

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester 1 TA 2018 adalah sebesar Rp11.178.444.928 atau 53,75% dari anggaran belanja sebesar Rp20.798.829.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja semester 1 TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja semester 1 TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17,814,168,000	10,047,918,301	56.40
Belanja Barang	2,299,661,000	959,360,473	41.72
Belanja Modal	685,000,000	171,166,200	24.99
Belanja Bantuan Sosial	-		
Total Belanja Kotor	**20,798,829,000**	**11,178,444,974**	53.75
Pengembalian	(46)	-	-
Jumlah	**20,798,828,954**	**11,178,444,974**	53.75

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja semester 1 TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 17,71 persen dibandingkan realisasi belanja pada semester 1 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu belanja modal pada Tahun Anggaran 2018 lebih besar dari pada pagu belanja modal tahun 2017.
2. Pagu belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2018 lebih besar dari pagu belanja pegawai tahun 2017.
3. Bertambahnya realisasi belanja pegawai dikarenakan banyaknya mutasi hakim yang masuk ke Pengadilan Tinggi Banten.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10,047,918,255	8,225,726,673	22.15
Belanja Barang	959,360,473	782,160,038	22.66
Belanja Modal	171,166,200	488,879,000	(64.99)
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	**11,178,444,928**	**9,496,765,711**	**17.71**

Belanja Pegawai Rp10.047.918.255

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.047.918.255 dan Rp8.225.726.673. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai semester 1 TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 22,15 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan hakim yang masuk ke Pengadilan Tinggi Banten.
2. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
3. Adanya kebijakan pemberian THR untuk PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,047,918,301	8,225,726,825	22.15
Belanja Lembur		-	100.00
Jumlah Belanja Kotor	**10,047,918,301**	**8,225,726,825**	**22.15**
Pengembalian Belanja Pegawai	(46)	(555,011)	(99.99)
Jumlah Belanja	**10,047,918,255**	**8,225,171,814**	**22.16**

Belanja Barang Rp959.360.473

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp959.360.473 dan Rp782.160.038. Realisasi Belanja Barang semester 1 TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 22,66 persen dari Realisasi Belanja Barang semester 1 TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan pada semester 1 tahun anggaran 2018 sudah terrealisasi belanja barang untuk kegiatan Pembinaan dan pengawasan serta telah terselenggarakannya bimbingan teknis IT dan Kepegawaian.

Perbandingan Belanja Barang Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	226,306,397	197,993,997	14.30
Belanja Barang Non Operasional	57,799,725	59,979,100	(3.63)
Belanja Jasa	84,725,475	63,846,380	32.70
Belanja Pemeliharaan	307,327,716	160,367,936	91.64
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	247,050,600	206,361,800	19.72
Belanja Barang Persediaan	36,150,560	93,860,825	(61.48)
Jumlah Belanja Kotor	**959,360,473**	**782,410,038**	**22.62**
Pengembalian Belanja	-	(250,000)	
Jumlah Belanja	**959,360,473**	**782,160,038**	**22.66**

Belanja Modal Rp171.166.200

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp171.166.200 dan Rp488.879.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada semester 1 TA 2018 mengalami penurunan sebesar 61,44 persen dibandingkan semester 1 TA 2017 disebabkan karena di semester 1 tahun 2018 pada pagu anggaran belanja modal masih banyaknya pagu belanja modal yang belum terrealisasi diantaranya pembelian genset, pembangunan rumah genset, instalasi genset, pembangunan tower air, pembelian mebeulair berupa lemari arsip dan meja serta pembelian wireless microphone.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,428,700	244,026,000	(42.86)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,737,500	199,885,000	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	39,985,000	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	4,983,000	0.00
Jumlah Belanja Kotor	**171,166,200**	**443,911,000**	**-61.44**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**171,166,200**	**443,911,000**	**-61.44**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp139.428.700

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester 1 TA 2018 adalah sebesar Rp139.428.700, mengalami penurunan sebesar 42,86 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp244.026.000. Hal ini disebabkan masih belum terrealisasi pagu belanja modal peralatan dan mesin seperti pembelian genset dan intalasinya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolahan Data	139,428,700	184,223,000	-24.32
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	59,803,000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	**139,428,700**	**244,026,000**	**-42.86**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**139,428,700**	**244,026,000**	**-42.86**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp31.737.500

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester 1 TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp31.737.500 dan Rp199.885.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan semester 1 TA 2018 mengalami penurunan sebesar 84,12 persen dibandingkan Realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan karena pada semester 1 tahun 2018 masih ada pagu belanja gedung dan bangunan yang belum terrealisasi seperti pembangunan rumah genset dan tower air.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	31,737,500	199,885,000	-84.12
Jumlah Belanja Kotor	**31,737,500**	199,885,000	-84.12
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**31,737,500**	**199,885,000**	**-84.12**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp75.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp75.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	63,157,150	-
Kuitansi	8,745,000	
Rekening bank	3,097,858	-
Jumlah	**75,000,000**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Jumlah	**-**	

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2018 dan 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.000.000. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Nama	TH 2018	TH 2017
1	Gempa Andey Setio	-	12,000,000
Jumlah		-	12,000,000

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2018 dan 2017

No	Nama	TH 2018	TH 2017
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp60.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Belanja Dibayar di Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran Persekot Gaji	-	-
Pembayaran Sewa Rumah Dinas	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp35.562.150

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp35.562.150 dan Rp35.443.375.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	33,353,150	70,549,100
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	2,209,000	-
Jumlah	**35,562,150**	**70,549,100**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berdasarkan Berita Acara Opname

Fisik Persediaan No. W29.U/1501/PL.03/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018.

Tagihan TP/TGR Rp12.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.000.000 dan Rp6.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	Gempa Andey Setio	12,000,000	6,000,000
Jumlah		**12,000,000**	**6,000,000**

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2018 dan 2017

No	Debitur	TH 2018	TH 2017
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang R60.000

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp60.000 dan Rp30.000. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	12,000,000	0.50%	60,000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**12,000,000**		**60,000**
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**12,000,000**		**60,000**

Tanah Rp22.301.011.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banten per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp22.301.011.000 dan Rp22.301.011.000. Terdapat mutasi masuk atau mutasi keluar pada Aset

Tanah Pengadilan Tinggi Banten.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**22,301,011,000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2018	**22,301,011,000**

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Atas Nama	Lokasi	Peruntukan	Nilai
1	7,230	Pemerintah RI	Jl. Raya Pandeglang Km. 6.6	Kantor dan Rumah Dinas	14,960,894,000
2	2,310	Pemerintah RI	Jl. Bhayangkara, Cipocok	Rumah Dinas	7,340,117,000
Jumlah					**22,301,011,000**

Peralatan dan Mesin Rp4.942.668.846

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp4.942.668.846 dan Rp5.011.157.746. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**5,011,157,746**
Mutasi tambah:	**139,428,700**
Perolehan Lainnya	-
Pembelian	139,428,700
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	**207,917,600**
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	207,917,600
Saldo per 30 Juni 2018	**4,942,668,846**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(4,379,926,861)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**562,741,985**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian 1 (satu) unit televisi senilai Rp14.984.200. Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor : W29.U/1065/PL.04/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018.
b. Pembelian 1 (satu) unit Overhead Projector senilai Rp5.948.500. Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor : W29.U/1172/PL.04/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
c. Pembelian Laptop 9 Unit senilai Rp112.500.000. Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor : W29.U/1017/PL.04/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
d. Pembelian 1 unit Scanner senilai Rp5.996.000. Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor : W29.U/1243/PL.04/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.

Mutasi transaksi keluar peralatan dan mesin senilai Rp207.917.600 berupa penghentian Aset dari penggunaan:

1. Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2 unit senilai Rp7.000.000;
2. Mesin Ketik Listrik 3 unit senilai Rp6.720.000;
3. Lemari Kayu 2 unit senilai Rp4.300.000;
4. Papan Visual / Papan Nama 23 unit senilai Rp22.930.000;
5. Alat Penghancur Kertas 1 unit senilai Rp975.000;
6. Meja Kerja Kayu 2 unit senilai Rp6.160.000;
7. Kursi Kayu 2 unit senilai Rp6.000.000;

8. Sice 1 unit senilai Rp2.730.000;
9. Meja Komputer 1 unit senilai Rp1.000.000;
10. Partisi 2 unit senilai Rp7.114.100;
11. AC Split 9 unit senilai Rp61.876.500;
12. Kipas Angin 1 unit senilai Rp1.000.000;
13. Stabilisator 10 unit senilai Rp14.340.000;
14. Dispenser 3 unit senilai Rp2.685.000;
15. Gordyn /Kray 1 unit senilai Rp587.000;
16. PC unit 5 unit senilai Rp62.500.000

Gedung dan Bangunan Rp9.062.621.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp9.062.621.000 dan Rp9.037.175.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**9,037,175,000**
Mutasi tambah:	25,446,000
Pengembangan Melalui KDP	25,446,000
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2018	**9,062,621,000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(247,355,363)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**8,815,265,637**

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari Pengembangan melalui KDP senilai Rp25.446.000. Sesuai Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:

1. BASTP Perencanaan Kolam Depan Kantor Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/503/BASTP/Pengad.L/II/2018 Tanggal 13 Februari 2018 SPM No. 00032 SP2D No. 180201301004104 Tanggal 16 Maret 2018 senilai Rp1.050.000;

2. BASTP Kolam Depan Kantor Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W2.U/807/BASTP/Pengad.L/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 SPM No. 00042 SP2D No. 180201302001622 Tanggal 11 April 2018 senilai Rp22.679.000;
3. SPM Honor Pengadaan Kolam Depan Kantor Pengadilan Tinggi Banten No. 00058 SP2D No. 180201301008575 Tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp1.717.000.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp387.747.000

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp387.747.000 dan Rp387.747.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**387,747,000**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2018	**387,747,000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	(103,698,024)
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**284,048,976**

Pada semester ini tidak terdapat mutasi masuk ataupun keluar pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya Rp6.355.062

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp6.355.062 dan Rp6.355.062. Aset tetap tersebut

berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk semester 1 Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**6,355,062**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2018	**6,355,062**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**6,355,062**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp6.291.500

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.291.500 dan Rp0. Terdapat penambahan KDP pada semester 1 2018 sebesar Rp31.737.500 berupa pengembangan Gedung dan Bangunan. Tetapi telah menjadi Aset Definitif sebesar Rp25.446.000 sehingga saldo KDP per 30 juni 2018 sebesar Rp6.291.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp4.730.980 .248)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp4.730.980.248) dan (Rp4.680.149.029). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester 1 Tahun Anggaran 2018

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,942,668,846	(4,379,926,861)	562,741,985
2	Gedung dan Bangunan	9,062,621,000	(247,355,363)	8,815,265,637
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	387,747,000	(103,698,024)	284,048,976
4	Aset Tetap Lainnya	6,355,062	0	6,355,062
	Akumulasi Penyusutan	**14,399,391,908**	**(4,730,980,248)**	**9,668,411,660**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Banten berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2018	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2018	-
Nilai Buku per 30 Juni 2018	**-**

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2018

Uraian	Nilai Perolehan
Jumlah	**0**

Aset Lain-Lain Rp357.917.600

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp357.917.600 dan Rp150.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**150,000,000**
Mutasi tambah:	
Usulan Barang rusak berat ke Pengelola	207,917,600
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2017	**357,917,600**
Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2017	(356,867,600)
Nilai Buku per 30 Juni 2017	**1,050,000**

Transaksi Penambahan berupa usulan barang hilang ke pengelola senilai Rp207.917.600 adalah:

1. Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2 unit senilai Rp7.000.000;
2. Mesin Ketik Listrik 3 unit senilai Rp6.720.000;
3. Lemari Kayu 2 unit senilai Rp4.300.000;
4. Papan Visual / Papan Nama 23 unit senilai Rp22.930.000;
5. Alat Penghancur Kertas 1 unit senilai Rp975.000;
6. Meja Kerja Kayu 2 unit senilai Rp6.160.000;
7. Kursi Kayu 2 unit senilai Rp6.000.000;
8. Sice 1 unit senilai Rp2.730.000;
9. Meja Komputer 1 unit senilai Rp1.000.000;
10. Partisi 2 unit senilai Rp7.114.100;
11. AC Split 9 unit senilai Rp61.876.500;
12. Kipas Angin 1 unit senilai Rp1.000.000;
13. Stabilisator 10 unit senilai Rp14.340.000;
14. Dispenser 3 unit senilai Rp2.685.000;
15. Gordyn /Kray 1 unit senilai Rp587.000;

16. PC unit 5 unit senilai Rp62.500.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp356.867.600)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp356.867.600) dan (Rp150.000.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	357,917,600	(356,867,600)	1,050,000
Jumlah	**357,917,600**	**(356,867,600)**	**1,050,000**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp75.000.000

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp75.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan

KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp36.870.852. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Banten per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak ketiga	-	
Utang Kepada Pihak Ketiga	-	
Total	-	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.440.800. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2018 dan 2017 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp32.019.253.510

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.019.253.510 dan Rp32.077.338.502. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp17.126.010

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp17.126.010 dan Rp28.464.045. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	17,126,010	28,464,045	(40)
Jumlah	**17,126,010**	**28,464,045**	(40)

Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan tahun 2018.

Beban Pegawai Rp10.024.344.118

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.024.344.118 dan Rp8.228.402.623. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,028,318,100	1,979,561,320	2
Beban Pembulatan Gaji PNS	23,894	20,236	18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	156,849,610	127,574,012	23
Beban Tunj. Anak PNS	32,924,362	30,541,694	8
Beban Tunj. Struktural PNS	46,935,000	40,230,000	17
Beban Tunj. Fungsional PNS	5,950,760,000	4,570,840,000	30
Beban Tunj. PPN PNS	1,121,709,632	850,272,041	32
Beban Tunj. Beras PNS	80,096,520	82,993,320	(3)
Beban Uang Makan PNS	227,972,000	209,160,000	9
Beban Tunj. Umum PNS	28,755,000	27,710,000	4
Beban Tunj. Hakim Ad Hoc	350,000,000	309,500,000	13
Beban Lembur		-	0
Jumlah	**10,024,344,118**	**8,228,402,623**	22

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp40.999.435

Jumlah Beban Persediaan pada semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp40.999.435 dan Rp60.110.905. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester 1 TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40,999,435	60,110,905	(32)
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	**40,999,435**	**60,110,905**	(32)

Beban Barang dan Jasa Rp355.534.882

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp355.534.882 dan Rp321.819.477. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	186,846,897	160,758,272	16.23
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,706,500	6,972,375	(3.81)
Beban honor Operasional Satuan kerja	28,450,000	29,750,000	(4.37)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	513,350	100.00
Beban Bahan	45,309,725	52,389,600	(13.51)
Beban Honor Output Kegiatan	10,750,000	0	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,740,000	7,589,500	(77.07)
Beban Langganan Listrik	51,810,142	59,305,562	(12.64)
Beban Langganan Telepon	1,301,341	1,840,818	(29.31)
Beban Sewa	11,420,277	0	0.00
Beban Jasa Profesi	11,200,000	2,700,000	314.81
Beban Jasa Lainnya	0	0	100.00
Jumlah	**355,534,882**	**321,819,477**	10.48

Beban Pemeliharaan Rp307.327.716

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp307.327.716 dan Rp138.193.136. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166,499,800	7,696,000	2063.46
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	0	555,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140,827,916	124,921,936	12.73
Beban Pemeliharan Jaringan	0	875,000	100.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	4,145,200	(100.00)
Jumlah	**307,327,716**	**138,193,136**	122.39

Beban Perjalanan Dinas Rp247.050.6

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp247.050.600 dan Rp260.111.800. Beban tersebut merupakan beban

00

yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. penurunan beban perjalanan dinas disebabkan adanya pemotongan perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	69,212,600	96,851,800	-28.54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	1,800,000	-58.33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	177,088,000	107,460,000	64.79
Jumlah	**247,050,600**	**206,111,800**	**19.86**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Jumlah	**0**	**0**	

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
Jumlah	0	0	

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp257.698.819

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp257.698.819 dan Rp209.615.344. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	120,531,944	117,483,525	2.59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	117,167,171	84,888,807	38.02
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	19,824,704	7,243,012	173.71
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	175,000	-	-
Jumlah Penyusutan	**257,698,819**	**209,615,344**	**(123.61)**
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	**-**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**257,698,819**	**209,615,344**	**-**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp30.000)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp30.000) dan (Rp30.000). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	(30,000)	(30,000)	0.00
Jumlah	**(30,000)**	**(30,000)**	0.00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp45.150)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Kantor	0	0	100.00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	(639,600)	0.00
Penerimaan Kembali Bel Pegawai TAYL	0	120	(100.00)
Perolehan Lainnya BMN	0	0	100.00
beban Penyesuaian nilai persediaan	191,530	(201,285)	(100.00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	146,380	51,665	100.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(45,150)**	**(789,100)**	(94.28)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Jumlah	**0**	**0**	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp32.077.338.502

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.077.338.502 dan Rp11.421.776.638.

Defisit LO (Rp11.215.844.710)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp11.215.844.710)

dan (Rp9.136.548.340). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan yang merupakan peralatan dan mesin.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp11.157.759.718

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.157.759.718 dan Rp9.462.301.546 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,178,444,928
Diterima Dari Entitas Lain	(20,685,210)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**11,157,759,718**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, Diterima Dari Entitas Lain sebesar (Rp20.685.210) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp11.178.444.928.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
			Rp -
			Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Ekuitas Akhir Rp32.019.253.510

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.019.253.510 dan Rp11.747.529.844.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat persediaan belum diregister negative per 30 juni 2018 sebesar Rp5.012.800 merupakan pembelian ATK yang belum di pertanggung jawabkan oleh bendahara.

Pengadilan Tinggi Banten
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2017	Beban Peny. Periode Ini	Akm. Peny. Per 30-06-2018	Nilai Buku Per 30-06-2018
A	**Tanah**						
1	Tanah	-	**22,301,011,000**	-	-	-	**22,301,011,000**
	Jumlah		**22,301,011,000**	-	-	-	**22,301,011,000**
B	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	1,069,214,752	1,050,116,395	19,098,357	1,069,214,752	-
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		490,000	122,500	122,500	245,000	
3	Alat Pengolahan		959,000	959,000	-	959,000	-
4	Alat Kantor	5	643,785,026	628,101,026	9,422,350	596,823,376	46,961,650
5	Alat Rumah Tangga	5	2,280,340,968	2,050,782,448	48,947,160	1,996,237,008	284,103,960
6	Alat Studio		84,118,000	51,108,000	4,933,000	56,041,000	28,077,000
7	Alat Komunikasi	5	18,250,000	18,250,000	-	18,250,000	-
8	Komputer Unit	4	713,815,100	593,586,148	28,132,326	559,218,474	154,596,626
9	Peralatan Komputer	4	124,696,000	66,062,000	9,876,251	75,938,251	48,757,749
10	Unit Peralatan Proses /Produksi	0	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-
	Jumlah		**4,942,668,846**	**4,466,087,517**	**120,531,944**	**4,379,926,861**	**562,741,985**
C	**Gedung dan Bangunan**						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7,186,204,000	107,435,582	94,414,562	201,850,144	6,984,353,856
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1,617,771,000	19,604,365	19,604,364	39,208,729	1,578,562,271
3	Tugu / Tanda Batas	50	258,646,000	3,148,245	3,148,245	6,296,490	252,349,510
	Jumlah		**9,062,621,000**	**130,188,192**	**117,167,171**	**247,355,363**	**8,815,265,637**
D	**Jalan dan Jembatan**						
1	Jalan		30,538,000	15,269,000	15,269,000	30,538,000	-
	Jumlah		**30,538,000**	**15,269,000**	**15,269,000**	**30,538,000**	**0**
E	**Irigasi**						
1	Bnngunan Air Irigasi		52,911,000	661,388	661,388	1,322,776	51,588,224
2	Bangunan pengairan pasang surut		35,428,000	442,850	442,850	885,700	34,542,300
3	Bangunan air bersih/air baku		23,268,000	381,443	381,443	762,886	22,505,114
			111,607,000	**1,485,681**	**1,485,681**	**2,971,362**	**108,635,638**
D	**Jaringan**						
1	Instalasi Pembangkit Listrik		76,242,000	21,919,564	953,024	22,872,588	53,369,412
2	Instalasi Gardu / Listrik		93,118,000	23,279,500	1,163,975	24,443,475	68,674,525
3	Jaringan Listrik	40	76,242,000	21,919,575	953,025	22,872,600	53,369,400
	Jumlah		**245,602,000**	**67,118,639**	**3,070,024**	**70,188,663**	**175,413,337**
F	**Aset Tetap yang tidak digunakan**						
1	Alat Angkut Darat bermotor		150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-
2	Alat Kantor		41,925,000	-	175,000	40,875,000	1,050,000
3	Alat Rumah Tangga		103,492,600	-	-	103,492,600	-
4	Komputer Unit		62,500,000	-	-	62,500,000	-
	Jumlah		**357,917,600**	**150,000,000**	**175,000**	**356,867,600**	**1,050,000**
	Total		**37,051,965,446**	**4,830,149,029**	**257,698,820**	**5,087,847,849**	**31,964,117,597**

* Beban Amortisasi